



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT
KOTA BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2019

KATA PENGANTAR

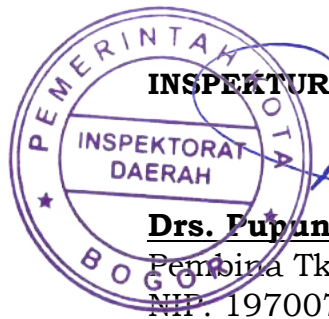
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 Inspektorat Kota Bogor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2019 yang mengacu kepada Rencana Strategis Inspektorat Kota Bogor Tahun 2014 – 2019. Secara yuridis formal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 pada Inspektorat Kota Bogor ini kami sampaikan. Akhirnya, semoga semua aktivitas yang kita lakukan selama ini, menjadi amal ibadah dan kebaikan yang senantiasa diterima oleh Allah SWT.

Aamiin.


INSPEKTUR KOTA BOGOR.
Drs. Pung W. Purnama, M.Si.
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19700715 199009 1 002



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta Susunan Organisasi	1
C. Dasar Hukum	2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. Perencanaan Kinerja	4
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	6
C. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	7
D. Strategi dan Kebijakan	8
E. Program dan Indikator Kinerja Program	9
F. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT KOTA BOGOR TAHUN 2019	14
A. Pengukuran Kinerja	14
B. Evaluasi dan Analisis capaian kinerja	14
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Target dan Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019 -----	9
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Inspektorat Tahun Anggaran 2019 -----	11
Tabel 2.3. Lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2019 ---	12
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 1 Tahun 2019 -----	14
Tabel 3.2. Tingkat kematangan Implementasi SPIP-----	15
Tabel 3.3. Tabel Rekapitulasi Skor penilaian QA dari BPKP Pusat. -	16
Tabel 3.4. Tabel Rekapitulasi hasil survey eksternal untuk menilai Indeks Persepsi Korupsi -----	18
Tabel 3.5. Tabel Rekapitulasi hasil Penilaian Akhir pada LKE ZI menuju WBK -----	18
Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 2 Tahun 2019 -----	19
Tabel 3.7. Tabel Capaian predikat Level per Elemen -----	20



DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Gambaran Umum Kota Bogor -----	1
Gambar 2.1	Misi dan Tujuan -----	7
Gambar 2.2	Tujuan dan Sasaran -----	7
Gambar 3.1	Surat Kutipan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor 2019 -----	25
Gambar 3.2	Kutipan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor 2019 -----	26
Gambar 3.3.	Grafik pencapaian Opini BPK dari 2014 – 2019 -----	26



IKHTISAR EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019 Inspektorat Kota Bogor menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja tahun 2019 Inspektorat Kota Bogor yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Inspektorat Kota Bogor, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dan wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (Jankin) yang telah dijanjikan oleh Inspektur Kota Bogor.

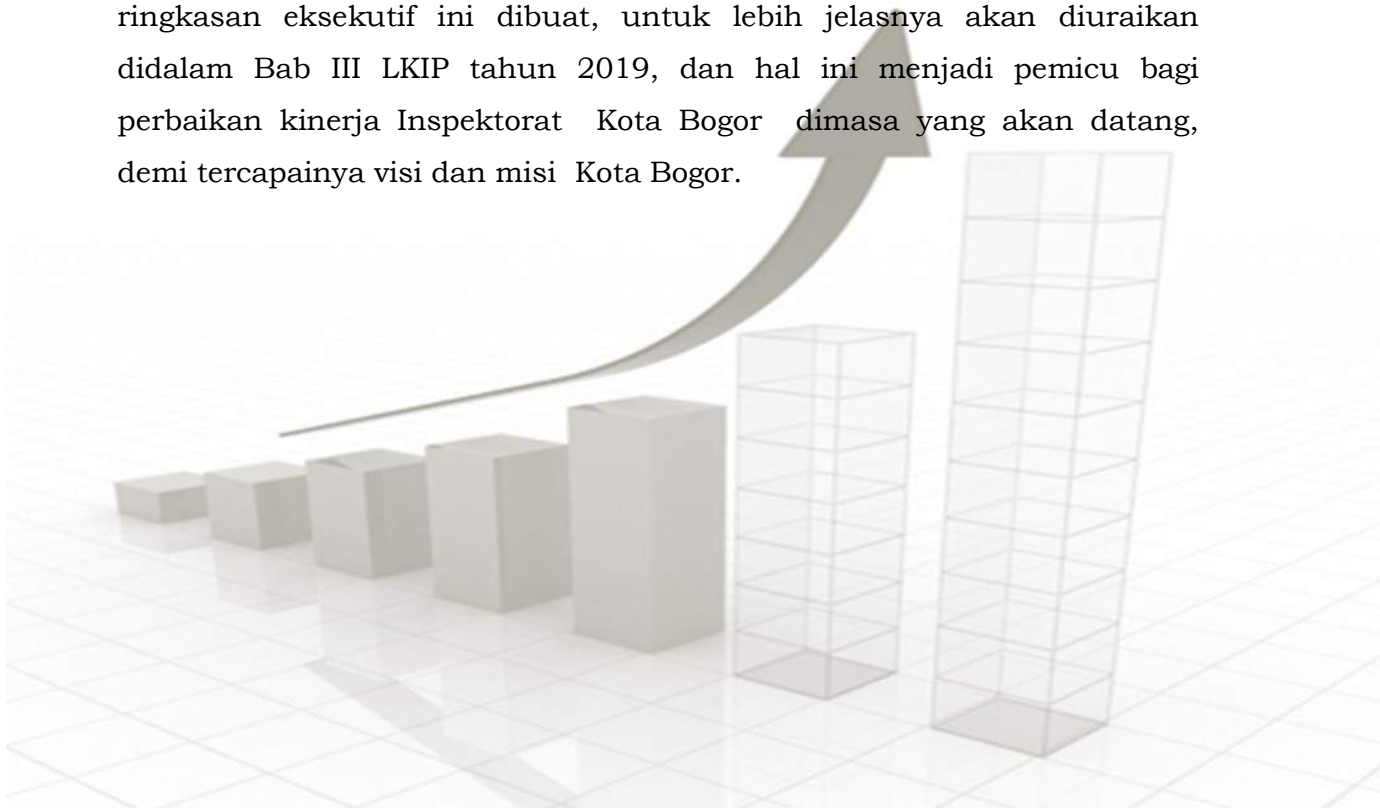
Inspektorat Kota Bogor telah menetapkan visi dan misi dalam Renstra Tahun 2015-2019, yaitu dengan visi **“Menjadi katalisator Penyelenggaraan Pemerintah daerah Yang Transparan”** yang didukung dengan misi yaitu :

1. Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas dan Efektif;
2. Mewujudkan kapabilitas pengawasan melalui aparat pengawasan yang profesional;

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut Inspektorat Kota Bogor telah menetapkan dan merealisasikan tujuan dan sasaran utama, dengan capaian kinerja Utama pada tahun 2019, yaitu terdiri atas :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi	
			2018	2019	2018	2019
1	Meningkatnya kualitas SPIP	Level maturitas SPIP	2	3	2	3
		Tingkat / Level Kapabilitas APIP	2	3	2	3
		Jumlah PD yang mendapat predikat WBK	2	2	2	0
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah yang memenuhi kriteria "CC" keatas	60	65	60	100
		Nilai SAKIP Inspektorat	B	A	B	A
		Opini BPK atas LKPD Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP

Dalam mencapai kinerja tersebut Inspektorat Kota Bogor pada tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar **Rp.15.309.823.126,-** dengan realisasi sebesar **Rp.14.376.726.195,-** atau **93,91%**, disamping itu juga terdapat dukungan sumberdaya manusia personil sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) orang PNS yang terdiri dari 6 (Enam) orang Pejabat Struktural, 31 (tiga puluh satu) orang Pejabat Fungsional Auditor dan 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah / P2UPD, 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Auditor Kepegawaian dan 10 (sepuluh) orang Pelaksana. Demikian ringkasan eksekutif ini dibuat, untuk lebih jelasnya akan diuraikan didalam Bab III LKIP tahun 2019, dan hal ini menjadi pemicu bagi perbaikan kinerja Inspektorat Kota Bogor dimasa yang akan datang, demi tercapainya visi dan misi Kota Bogor.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Kota Bogor merupakan salah satu Kota Penyangga Ibu Kota. Jarak antara Kota Bogor dengan Jakarta kurang lebih 60 Km sedangkan jarak Kota Bogor dengan Kota Bandung sekitar 120 Km.

Bogor dikenal dengan julukan kota hujan, karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Kota Bogor terdiri atas 6 (enam) Kecamatan dengan total 68 (enam puluh delapan) kelurahan. Kota Bogor juga dikenal dengan sebutan Buitenzorg yang berarti "tanpa kecemasan" atau "aman tenteram".



Gambar 1.1 Gambaran Umum Kota Bogor

Bogor juga dikenal sebagai pusat penelitian pertanian nasional. Di sinilah berbagai lembaga dan balai penelitian pertanian dan biologi berdiri sejak abad ke 19. Salah satu yang terbesar adalah Institut Pertanian Bogor, yang berdiri sejak awal abad ke 20.

Kota Bogor memiliki banyak ikon wisata, salah satunya Kebun Raya Bogor dan Istana Negara yang dikelilinginya dijadikan sarana olahraga.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta Susunan Organisasi

1. Kedudukan

Kedudukan Inspektorat Kota Bogor diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D). bahwa Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota dan membantu Wali Kota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah dan Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Inspektorat Kota Bogor sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah Kota Bogor merupakan unsur penunjang dibidang pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Inspektorat Kota Bogor adalah membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bogor, maka struktur organisasi Inspektorat Kota Bogor terdiri dari:

- a. Inspektur
- b. Sekretaris :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi
- c. Irban I membawahi Jabatan Fungsional
- d. Irban II membawahi Jabatan Fungsional
- e. Irban III membawahi Jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bogor Tahun 2019 mengacu kepada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas di Lingkungan Inspektorat Inspektorat Kota Bogor;
9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 90 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Inspektorat Kota Bogor;

BAB II

PERENCANAAN AN PERJANJIAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas pengambilan keputusan didepan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program / kegiatan. Perencanaan Kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program / kegiatan. Dalam menyusun Perencanaan Kinerja, dimaksudkan untuk :

1. Menghubungkan perencanaan strategi dengan perencanaan operasional.
2. Memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja.
3. Memudahkan penetapan kinerja periode mendatang.

Rencana Strategis meliputi pernyataan visi dan misi, penetapan tujuan, serta penentuan strategi /cara pencapaian tujuan (kebijakan, program, dan kegiatan), yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. VISI & MISI :

Untuk mendorong terwujudnya Visi Kota Bogor : “Kota perdagangan dengan Sumber Daya Manusia produktif dan pelayanan prima“, maka Inspektorat Kota Bogor sebagai unit teknis dibidang pengawasan menetapkan visi Inspektorat Kota Bogor dalam Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019, yaitu:

“Menjadi Katalisator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Transparan.”

Makna dari Visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Katalisator

Makna dari katalisator adalah terjadinya sesuatu perubahan, mempercepat dalam suatu proses,

2. Transparan

Makna dari kata Transparan adalah terbuka dan mudah di akses dengan mudah. Visi Inspektorat Kota Bogor sesuai dengan fungsinya dalam bidang pengawasan akan menjadi motivator untuk dapat melakukan perubahan dan percepatan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam menjalankan kebijakan, program dan systemnya dapat diakses informasi aktualnya dengan mudah oleh masyarakat

Dalam rangka mencapai visi tersebut, kita harus mempunyai misi yang merupakan serangkaian tindakan nyata yang harus diemban dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, adapun Misi Inspektorat Kota Bogor Tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas dan Efektif
- 2) Meningkatkan Kapasitas APIP yang kompeten dan profesional.

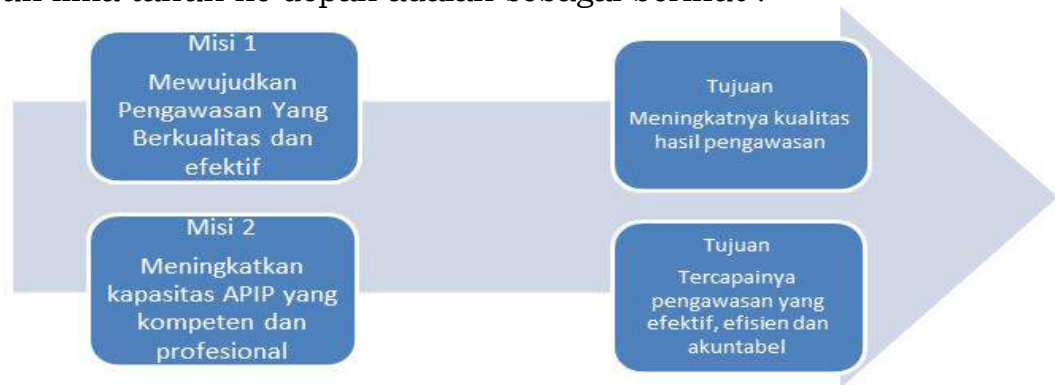
Tujuan yang akan dicapai Inspektorat Kota Bogor untuk lima tahun ke depan adalah Meningkatnya kinerja keuangan dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Sedangkan **Sasaran** yang ingin dicapai dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas SPIP dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Sementara itu **Kebijakan** yang ditetapkan Inspektorat Kota Bogor sesuai dalam rencana strategis adalah tersusunnya sistem pengawasan yang terarah dan terukur sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan yang telah ditetapkan.

B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi.

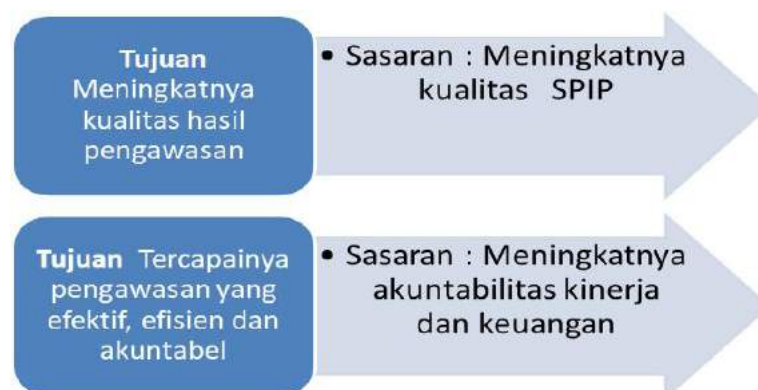
Sebagai penjabaran visi dan misi Inspektorat Kota Bogor yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, maka tujuan dan indikator kinerja tujuan yang akan dicapai Inspektorat untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Misi dan Tujuan

C. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Inspektorat Kota Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 : Tujuan dan Sasaran

Pada masing-masing sasaran terdapat indikator untuk mengukur sasaran yang akan dicapai dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran pertama : Meningkatnya kualitas SPIP, dengan indikator kinerja sasaran :

- a. Level maturitas SPIP
- b. Jumlah PD yang mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Sasaran kedua : Meningkatnya Kualitas APIP yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja sasaran :

- a. Tingkat/Level kapabilitas APIP.
- b. Nilai SAKIP Inspektorat.
- c. Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah yang memenuhi kriteria CC ke atas (%).
- d. Opini BPK atas LKPD Kota Bogor.

Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan strategi untuk pencapaiannya. Strategi harus dibangun dan dilandasi kepada informasi maupun data-data yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

D. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan kebijakan dan program program. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Bogor adalah

“Tersusunnya Sistem Pengawasan Yang Terarah dan Terukur sesuai dengan peraturan perundang undangan di Bidang Pengawasan yang telah ditetapkan ”

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi. Untuk 2015-2019. Kebijakan yang ditetapkan adalah

“ Pengawasan atas pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan diarahkan dalam rangka menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta ketaatan dalam melaksanakan pengawasan.”

E. Program dan Indikator Kinerja Program

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka program yang akan dilaksanakan Inspektorat pada Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut :

No	TUJUAN SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019
1	Tujuan 1			
	Terwujudnya birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani publik secara prima			
	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas SPIP	Level maturitas SPIP	Level	3
		Jumlah PD yang mendapat predikat WBK	SKPD	2
	Program			
	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	level maturitas penerapan SPIP	Level	3
		penetapan PD berpredikat WBK	PD	3
	Sasaran 2 Meningkatnya	Tingkat / Level Kapabilitas APIP	Level	3

No	TUJUAN SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019
	akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	A
		Nilai SAKIP Inspektorat	%	65
		Opini BPK atas LKPD Kota Bogor	Opini	WTP
	Program			
1	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	peningkatan level kapabilitas APIP	Level	3
		tingkat kesesuaian laporan aksi PPK dengan data dukung (%)	%	100
		opini BPK atas LKPD kota bogor	Opini	WTP
		tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (inspektorat kota Bogor)(%)	%	100
		tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (inspektorat provinsi jawa barat)	%	74
		tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan eksternal (BPK)(%)	%	89
		tidak adanya auditor yang di bebaskan sementara karna kekuarangan angka kredit		0
2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	hasil evaluasi LKIP SKPD yang memenuhi kriteria minimal "B"	%	65
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	84
		Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100
4	Pelayanan Administrasi Pekantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	90
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	90

Tabel 2.1. Target dan Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2019

Tahun 2019 Inspektorat Kota Bogor mendapatkan Anggaran Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai Inspektorat Kota Bogor sebesar **Rp15.309.823.126,-** sedangkan Anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp14.376.726.195,-** untuk pelaksanaan 12 (dua belas) Kegiatan, rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Anggaran Setelah Rasionalisasi	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
1	Gaji PNS dan Tunjangan	12.506.831.167	12.300.329.460	98,34
	Total Belanja Tidak Langsung	12.506.831.167	12.300.329.460	98,34
B	BELANJA LANGSUNG			
1	Pengelolaan Rumah Tangga OPD	1.276.557.459	965.296.977	75,68
2	Pengadaan Inventaris Kantor	586.350.000	556.750.000	94,95
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor	238.000.000	230.558.873	96,87
4	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Inspektorat	244.000.000	226.230.000	92,72
5	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD	25.684.000	9.376.000	36,51
6	Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)	203.000.000	28.650.000	14,11
7	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (satgas SPIP)	47.460.000	14.687.000	30,95
8	Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	13.300.000	9.400.000	70,68
9	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.650.000	3.850.000	69,24
10	Pemutakhiran data Hasil Pemeriksaan	12.225.000	12.120.000	99,14
11	Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)	131.625.000	1.000.000	0,76
12	Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor dan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	19.140.000	18.477.885	96,54
	Total Belanja Langsung	2.802.991.959	2.076.396.735	74,08
	JUMLAH KESELURUHAN	15.309.823.126	14.376.726.195	93,91

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Kegiatan Inspektorat Tahun Anggaran 2019

F. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, maka disusunlah **Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Bogor yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Eselon II, III, dan IV.**

Perjanjian Kinerja Eselon II yaitu dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektur Kota Bogor oleh Wali Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya kualitas SPIP	1.	Level Meturitas Penerapan SPIP	3
		2.	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	2
2.	Meningkatnya Akuntabilitas /kinerja Keuangan	1.	Tingkat Level Kapabilitas APIP	3
		2.	Nilai SAKIP Inspektorat	A
		3.	Hasil Evaluasi LAKPI OPD yang memenuhi kriteria minimal CC ke atas (%)	65
		4.	Opini BPK atas KPPD Kota Bogor	WTP
No.	Program		Anggaran	Ket.
1.	Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah		419.100.000,-	
2.	Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		38.984.500,-	
3.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.274.557.459,-	
4.	Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur		1.068.350.000,-	
	JUMLAH		2.800.991.959,-	

Tabel 2.3. Lampiran Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Eselon III yaitu dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretaris dan Inspektur Pembantu oleh Inspektur Kota Bogor.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun ber sangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat tahun tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja juga digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pem berian penghargaan dan sanksi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar kinerja aparatur evaluasi.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
INPSEKTORAT KOTA BOGOR
TAHUN 2019

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

INSPEKTORAT KOTA BOGOR TAHUN 2019

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Bogor Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi pada akhir tahun 2019 menunjukkan bahwa dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang belum tercapai.

B. Evaluasi dan Analisis capaian kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing masing sasaran tahun 2019 Inspektorat Kota Bogor, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 :Meningkatnya kualitas SPIP

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Targ et 2019	Capaian 2019	%
1.	Meningkatnya kualitas SPIP	Level maturitas SPIP	3	3	100
		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK	2	0	0

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 1 Tahun 2019

Pada indikator kesatu, yaitu Level Maturitas SPIP merupakan Tingkat Kematangan (maturity level) SPIP yang menggambarkan tahapan proses yang lebih diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Perkembangan Level Maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor dimulai sejak Tahun 2017 dengan nilai 1,43 (rintisan). Pada Tahun 2018 dilakukan penilaian BPKP dengan hasil yang masih sama. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Inspektorat Kota Bogor menargetkan Level Maturitas SPIP Tahun 2019 berada pada level 3 dengan tingkat kematangan terdefinisi. Tingkat kematangan Implementasi SPIP diukur dalam skala 0 hingga 5 dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Tingkat Maturitas	Interval Score
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{score}, 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Tabel 3. 2. Tingkat kematangan Implementasi SPIP

Pada tahun 2019 Inspektorat Kota Bogor secara intensif melakukan koordinasi dan pendampingan dengan BPKP P *Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 1 Tahun 2019* perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian dan laporan hasil *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP Pusat atas penilaian level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor untuk tahun 2019 dinyatakan Lulus untuk Level 3. Terkait

dengan pencapaian hal ini maka target Level Maturitas SPIP pada Tahun 2019 berada pada level 3, dinyatakan **Sudah tercapai**.

No.	Unsur SPIP	Skor Hasil QA
1	Lingkungan Pengendalian	3
2	Penilaian Risiko	3
3	Kegiatan Pengendalian	3
4	Informasi dan Komunikasi	3
5	Pemantauan	3

Tabel 3.3. Tabel Rekapitulasoi Skor penilaian QA dari BPKP Pusat.

Pencapaian target Maturitas SPIP Level 3 tercapai 100% sesuai dengan target, disebabkan :

1. Komitmen dari Wali Kota terhadap penerapan SPIP pada Pemerintah Kota Bogor.
2. Komitmen dari Kepala Perangkat daerah terhadap penerapan SPIP dan penyiapan bukti – bukti dalam implementasi.
3. Pembinaan dari BPKP Perwakilan Jawa Barat yang sangat intensif membantu Pemerintah Kota Bogor.
4. Telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP di masing – masing Perangkat Daerah yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, Esselon III, Kasubag dan Pelaksana.
5. Peran Inspektorat yang kuat dalam melakukan koordinasi dan mengarahkan Satgas SPIP di masing – masing Perangkat Daerah.
6. Pembinaan dan monitoring yang intensif dari Inspektorat terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan uji sampel dalam penerapan SPIP.
7. Tim Inspektorat yang solid dan penuh dedikasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada sasaran 1, indikator sasaran 2 yaitu Jumlah PD yang mendapat predikat WBK, bahwa Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (**WBK**) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (**WBBM**) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Terkait dengan Penetapan Perangkat Daerah Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Inspektorat pada tahun 2018 telah melakukan Penilaian Mandiri Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (**WBK**) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (**WBBM**) Pemerintah Kota Bogor terhadap 5 (lima) Perangkat Daerah yaitu RSUD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puskesmas Tanah Sereal, Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu. Pada tahun 2019 dilanjutkan dengan pembinaan dalam rangka pembangunan zona integritas untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi pada tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan 1 Maret 2019. Pada tanggal 4 Maret sampai dengan 20 Maret 2019 dilakukan penilaian mandiri dalam rangka zona integritas untuk mendapatkan predikat WBK dengan hasil nilai sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi hasil survey eksternal untuk menilai Indeks Persepsi Korupsi :

No	Perangkat Daerah	Nilai Indeks Persepsi Korupsi (skala 4)
1	RSUD Kota Bogor	3,39
2	Dinas Kependudukan dan	3,01

No	Perangkat Daerah	Nilai Indeks Persepsi Korupsi (skala 4)
	Pencatatan Sipil	
3	Dinas Kesehatan (Puskesmas Tanah Sareal)	3,13
4	Badan Pendapatan Daerah	3,15
5	Dinas Penanaman /Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	3,11

Tabel 3.4. Tabel Rekapitulasi hasil survey eksternal untuk menilai Indeks Persepsi Korupsi.

b. Rekapitulasi hasil survey eksternal

- a. Rekapitulasi hasil Penilaian akhir pada Lembar Kertas Evaluasi (LKE) Zona integritas (ZI) menuju WBK adalah :

No	Perangkat Daerah	Nilai Pengungkit	Nilai Hasil	Nilai Akhir
1	RSUD Kota Bogor	46,27	35,35	81,62
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32,22	31,34	63,56
3	Dinas Kesehatan (Puskesmas Tanah Sareal)	36,96	32,54	69,0
4	Badan Pendapatan Daerah	39,66	33,06	72,72
5	Dinas Penanaman /Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	43,59	31,96	75,55

Tabel 3.5. Tabel Rekapitulasi hasil Penilaian Akhir pada LKE ZI menuju WBK

Dari kelima Perangkat Daerah yang dinilai tersebut terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Apatur Negara dan RB yaitu RSUD Kota Bogor dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sasaran 2 :Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2019	CAPAIAN TAHUN 2019	%	CAPAIAN TAHUN 2018	%	KENAIKAN/PENURUNAN
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Tingkat/ Level Kapabilitas APIP	3	3	100	2	100	100
		Nilai SAKIP Inspektora t	A	A	100	B	100	
		Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria CC ke atas (%)	65	100	149,69	75 %	142,51	
		Opini BPK Atas LKPD Kota Bogor	WTP	WTP	100	WTP	100 %	100%

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke 2 Tahun 2019

Indikator kinerja kesatu pada Sasaran Kedua yaitu Tingkat Level Kapabilitas APIP. Terkait dengan Pencapaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Pada tahun 2017 kapabilitas APIP baru mendapatkan level 2. pada proses penilaian tahun 2018 dilakukan dua kali assesment untuk memperbaiki kekurangan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2019 kapabilitas APIP mendapatkan level 3 (pada bulan Desember 2019).

Inspektorat Kota bogor melakukan Konsultasi dan Koordinasi terkait peningkatan level kapabilitas ke BPKP Jawa Barat Pada tanggal 17 Oktober 2019 untuk dilakukan pendampingan penilaian kapabilitas

APIP **Level 3** dan untuk mempersiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan.

Kapabilitas APIP Kota Bogor dinilai oleh BPKP Pusat berdasarkan surat laporan Nomor : LQAPIP-1027/PW10/6/2019 tanggal 27 Desember 2019. Dan berdasarkan hasil tersebut APIP Kota Bogor mendapatkan predikat **level 3 (integrated)**

No	Elemen	Level
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan sumber daya manusia	3
3	Praktik profesional	3
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3
6	Struktur tata kelola	3

Tabel 3.7. Tabel Capaian predikat Level per Elemen

Sasaran ini didukung oleh Kegiatan sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP), dengan anggaran sebesar Rp.47.460.000,-
2. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK JFA), non anggaran.
3. Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan anggaran sebesar Rp. 131.625.000,-

Pada indikator sasaran kedua, yaitu Nilai SAKIP Inspektorat. Inspektorat Kota Bogor dalam menyusun dokumen pelaporan melibatkan Struktural dan Fungsional. Dokumen LKIP disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. LKIP Inspektorat Kota Bogor merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Penyusunan LKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKIP Inspektorat Kota Bogor telah dievaluasi oleh evaluator dengan hasil “A” (Memuaskan). Sasaran ini didukung oleh Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD dengan anggaran sebesar Rp.38.984.500,00,-.

Pada Indikator sasaran ketiga yaitu Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria CC keatas. Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat

dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumberdaya.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dimulai dari Survei Pendahuluan dengan maksud untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan/unit kerja yang akan dievaluasi, memberikan fokus kepada hal hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi, dan merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi. Pengumpulan data dan informasi pada survei pendahuluan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui angket (kuesioner), wawancara, observasi, studi dokumentasi, atau kombinasi diantara beberapa cara tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain dengan telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan sebagainya. Dari hasil survei pendahuluan, dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dengan fokus pada kriteria kriteria yang telah ditentukan namun tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi :

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Internal; dan
5. Capaian Kinerja.

Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator

kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub komponen dan butir butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian seperti dilustrasikan pada anak lampiran Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan.

Evaluasi SAKIP perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2019 dengan hasil sebagai berikut:

- a. **5** (lima) **Perangkat Daerah** mendapatkan nilai **A**
- b. **14** (empat belas) **Perangkat Daerah** mendapatkan nilai **BB**
- c. **18** (delapan belas) **Perangkat Daerah** mendapatkan nilai **B**

Target yang ditetapkan dalam renstra terkait dengan indikator tersebut adalah sebanyak 65% Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai CC keatas, dan pada tahun 2019 target tersebut telah melebihi target yaitu sebesar 100.

Selain melakukan evaluasi, Inspektorat Kota Bogor juga harus melakukan reviu terhadap LKIP Pemerintah Kota Bogor Tahun 2018, sebagai persyaratan terhadap penilaian LKIP Pemerintah Kota Bogor oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Reviu LKIP Pemerintah Kota Bogor Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2019 dengan hasil sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor agar melaksanakan Evaluasi Renstra seluruh SKPD agar

selaras dengan RPJMD 2015-2019 dan menetapkan hasilnya dengan Keputusan Wali Kota.

2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bogor agar melengkapi penyusunan Laporan Kinerja dengan Standar Nasional atau Standar Provinsi yang berkaitan dengan indikator kinerja sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kota Bogor sebagai data perbandingan capaian kinerja
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor agar memproses penetapan Keputusan Wali Kota tentang :
 - a. Perencanaan Strategis (Renstra) SKPD hasil Evaluasi oleh Bappeda.
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme penyusunan dan penyampaian data/informasi dari unit kerja kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja.

Sasaran ini didukung melalui Kegiatan Evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan anggaran sebesar Rp.13.300.000,-.

Pada Indikator sasaran **keempat**, yaitu Opini BPK atas LKPD Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2019 sesuai dengan target yang telah ditetapkan telah berhasil mendapatkan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2018. Opini Badan Pemeriksa Keuangan** (disingkat **Opini BPK**) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemerintah Kota Bogor menetapkan target opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan hasil

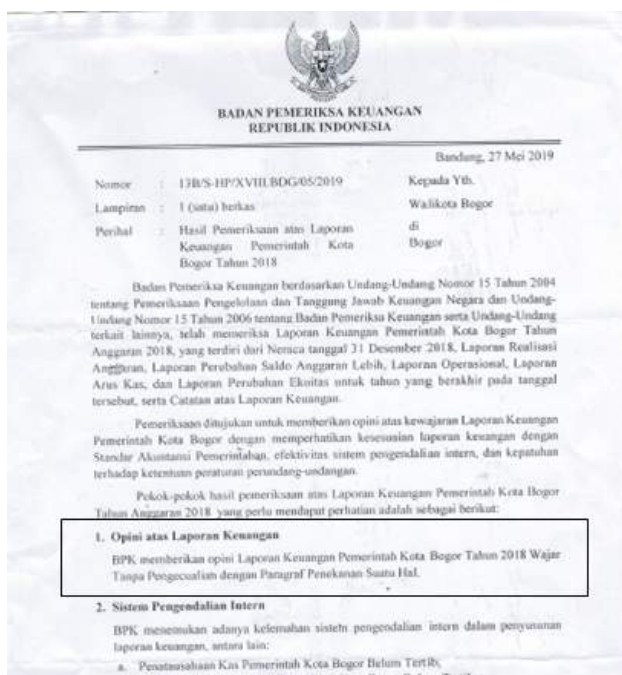
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2018 dengan Nomor : 13B/LHP/XVIII.BDG/05/2019 Tanggal 22 Mei 2019, Pemerintah Kota Bogor mendapatkan Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”.

Pencapaian kinerja Ini merupakan pengulangan prestasi dari tahun 2017. untuk mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor telah dilaksanakan upaya-upaya yang dilaksanakan berdasarkan komitmen seluruh perangkat daerah antara lain:

- Dibentuknya bengkel WTP untuk memudahkan seluruh perangkat daerah utk berdiskusi dan berkonsultasi dalam pemecahan masalah terkait penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.
- Peningkatan kualitas proses pengadaan barang dan jasa
- Pembenahan penatausahaan aset
- Percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

Berikut ini adalah kutipan surat terkait dengan Pemberian Opini WTP oleh BPK Propinsi Jawa Barat :

OPINI BPK 2019



Gambar 3.1. Surat Kutipan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor 2019

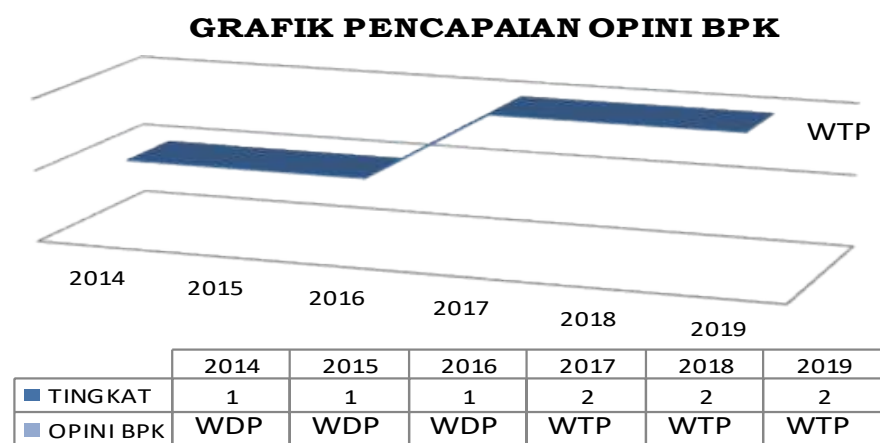
Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2018 Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal.

Gambar 3.2. Kutipan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor 2019

Terkait dengan strategi pada tahun 2019, Pemerintah Kota Bogor akan tetap melakukan upaya-upaya seperti tahun 2019. Upaya tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan opini WTP tersebut. Berikut ini adalah grafik pencapaian Opini :



Gambar 3.3. Grafik pencapaian Opini BPK dari 2014 - 2019

Pemerintah Kota Bogor mendapatkan Opini WTP dari BPK selain karena laporan Keuangan Pemerintah daerah dianggap wajar penyajiannya serta karena tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK semester I Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019, dengan hasil dari jumlah rekomendasi sebanyak 923 rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti sebanyak 923 rekomendasi, dan yang telah dinyatakan selesai sebanyak 862 rekomendasi, atau dengan capaian sebesar 93,39%. Pemutakhiran data temuan BPK semester II Tahun 2019

dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019, dengan hasil dari jumlah rekomendasi sebanyak 923 rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti sebanyak 923 rekomendasi dan yang telah dinyatakan selesai sebanyak 870 rekomendasi atau dengan capaian sebesar 94,26%.

Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 September sampai dengan 17 September 2019, bertempat di Bandung dengan hasil : dari 101 temuan dan 177 rekomendasi, yang telah ditindaklanjuti sebanyak 166 rekomendasi dan yang telah dinyatakan selesai sebanyak 137 rekomendasi, atau dengan capaian sebesar 77,40%. Dan pada tanggal 27 Desember 2019 dengan hasil : yang telah ditindaklanjuti sebanyak 166 rekomendasi dan yang telah dinyatakan selesai sebanyak 154 rekomendasi, atau dengan capaian sebesar 87,00%.

Terkait Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Bogordari Jumlah Rekomendasi sebanyak 247 rekomendasi, sebagian besar telah ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 80% dan sisa capaian 20% masih dalam progres.

Sasaran ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Audit operasional (PKPT dan non PKPT). Dengan anggaran sebesar Rp.203.000.000,
2. Reviu LKPD Kota Bogor, dengan anggaran sebesar Rp.5.650.000,
3. Pemutakhiran data hasil pemeriksaan, dengan anggaran sebesar Rp.12.225.000,
4. PAK JFA, non anggaran
5. Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dengan anggaran Rp.131.625.000,-

Indikator sasaran ini tercapai karena Pemerintah Kota Bogor telah berhasil mendapatkan **opini WTP** dari BPK.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bogor Tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Kota Bogor yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kota Bogor menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Bogor Tahun 2019 sebagai bahan Laporan pertanggungjawaban antara rencana kerja dan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Bogor di Tahun 2019, sekaligus sebagai catatan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Bogor sampai dengan akhir tahun 2019. Akhirnya semoga Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pijakan bagi penyusunan perencanaan serta peningkatan pelaksanaan tugas bagi Inspektorat khususnya dan Pemerintah Kota Bogor pada umumnya.



Bogor, Januari 2020

Inspektur Kota Bogor.

Dra. Puspung W. Purnama, M.Si.

Pembina Tingkat I - IV/b

NIP. 19700715 199009 1 002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

FORM CAPAIAN KINERJA RPJMD
INSPEKTORAT KOTA BOGOR

No	MISI	No	TUJUAN SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Misi 5 Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan								INSPEKTORAT
		1	Tujuan 1						
			Terwujudnya birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, serta mampu melayani publik secara prima						
			Sasaran 1 Meningkatnya kualitas SPIP	Level maturitas SPIP	Level	3	3	100,00	
				Jumlah PD yang mendapat predikat WBK	SKPD	2	0	0	
			Program						
			Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	level maturitas penerapan SPIP	Level	3	3	100,00	
				penetapan PD berpredikat WBK	PD	3	0	0	
			Sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Tingkat / Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100	
				Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	A	A	100	
				Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah yang memenuhi kriteria CC ke atas (%)	%	65	100	153,85	
				Opini BPK atas LKPD Kota Bogor	Opini	WTP	WTP	100	
			Program						
		1	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	peningkatan level kapabilitas APIP	Level	3	3	100,00	
				tingkat kesesuaian laporan aksi PPK dengan data dukung (%)	%	100	100	100,00	
				opini BPK atas LKPD kota bogor	Opini	WTP	WTP	100,00	

No	MISI	No	TUJUAN SASARAN / PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SATUAN	TARGET 2019	REALISASI 2019	% CAPAIAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (inspektorat kota Bogor)(%)	%	100	100	100,00	
				tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan internal (inspektorat provinsi jawa barat)	%	74	93,79	126,74	
				tindak lanjut rekomendasi temuan aparat pengawasan eksternal (BPK)(%)	%	89	100	112,36	
				tidak adanya auditor yang di bebaskan sementara karna kekuarangan angka kredit		0	0	100,00	
		2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	hasil evaluasi LKIP SKPD yang memenuhi kriteria minimal "B"	%	65	97,3	149,69	
		3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	Point	84	81,76	97,33	
				Prosentase temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	
		4	Pelayanan Administrasi Pekantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	90	90	100	
		5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	90	90	100	

FORM CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
INSPEKTORAT KOTA BOGOR

No	MISI	No	TUJUAN SASARAN *	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM		SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas dan efektif		Tujuan 1.1.	Indikator Tujuan 1.1. :						Inspektorat
			Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	1.1.1. Level maturitas SPIP		Level	2	3	100	
				1.1.2. Jumlah PD yang mendapat predikat WBK		PD	2	0	0	
			Sasaran 1.1	Indikator Sasaran 1.1 :						
			Meningkatnya kualitas SPIP	1.1.1. Level maturitas SPIP		Level	3	3	100	
				Program 1.1.1.1:	Indikator Kinerja Program :					
				Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Level maturitas penerapan SPIP	Level	3	3	100	
				1.1.2. Jumlah PD yang mendapat predikat WBK		PD	2	0	0	
				Program 1.1.1.2:	Indikator Kinerja Program :					
		Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penetapan PD Berpredikat WBK	PD	2	0	0			
			Tingkat kesesuaian laporan aksi PPK dengan data dukung	%	100	100	100			
2	Meningkatkan kapasitas APIP yang kompeten dan profesional		Tujuan 2.1.	Indikator Tujuan 2.1 :						
			Tercapainya pengawasan	2.1.1. Tingkat / Level Kapabilitas APIP		Level	3	3	100	
				2.1.2. Opini BPK atas LKPD Kota Bogor		Opini	WTP	WTP	100	
			Sasaran 2.1	Indikator Sasaran 2.1 :						
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	2.1.1. Tingkat / Level Kapabilitas APIP		Level	3	3	100	
				Program 2.1.1.1:	Indikator Kinerja Program :					
				Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. Peningkatan level kapabilitas APIP	Level	3	3	100	
					2. Tidak adanya auditor yang dibebaskan sementara karena kekurangan angka kredit	Orang	0	0	100	
					3. Peningkatan level kapabilitas APIP	Level	3	3	100	
				Program 2.1.2.1:						
	Pelayanan Administrasi Pekantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	90	90	100				
	Program 2.1.3.1:									
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	90	90	100				

No	MISI	No	TUJUAN SASARAN *	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PD PENANGGUNG JAWAB
				2.1.2. Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	A	A	100	
				Program 2.1.2.1:	Indikator Kinerja Program :				
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP perangkat daerah	Nilai	84	81,76	97,33
				2.1.3. Hasil evaluasi SAKIP perangkat	%	65	100	153,85	
				Program 2.1.3.1. :	Indikator Kinerja Program :				
				Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil evaluasi LKIP SKPD yang memenuhi kriteria minimal "CC"	%	65	100	153,85
				2.1.4. Opini BPK atas LKPD Kota Bogor	Opini	WTP	WTP	100	
				Program 2.1.4.1. :	Indikator Kinerja Program :				
				Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Opini BPK atas LKPD kota bogor	Opini	WTP	WTP	100

FORM CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
INSPEKTORAT KOTA BOGOR

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH *	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018/2019)	TARGET CAPAIAN 2019	REALISASI CAPAIAN 2019	% CAPAIAN
1	Level maturitas SPIP	Level	1	3	3	100%
2	Jumlah PD yang mendapat predikat WBK	SKPD	0	3	0	0%
3	Tingkat / Level Kapabilitas APIP	Level	0	3	3	100%
4	Hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah yang memenuhi kriteria CC ke atas (%)	%	45	65	97,03	149%
5	Opini BPK atas LKPD Kota Bogor	Opini	WDP	WTP	WTP	100%

EVALUASI TERHADAP HASIL RPJMD KOTA BOGOR TAHUN 2015 - 2019

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

[illegible]

No	Tujuan/ Sasaran/ Program	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Pada Akhir Periode Perencanaan	Target RPJMD Tahun ke					Capaian Target RPJMD Tahun ke					Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Rasio Capaian Akhir (%)
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
2		tindak lanjut rekomendasi tamuan aparat pengawasan internal (inspektorat provinsi jawa barat)	70,72	74	70,72	71	72	73	74	55,17	81,05	-	93,29	93,79	93,79	126,743
		tindak lanjut rekomendasi tamuan aparat pengawasan eksternal (BPK)(%)	83,2	89	85	86	87	88	89	95,97	98,64	98,88	100	100	100	112,36
		tidak adanya auditor yang di bebaskan sementara karna kekuarangan angka kredit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
3	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	hasil evaluasi LKIP SKPD yang memenuhi kriteria minimal "B"	40	65	45	50	55	60	65	2,9	5,4	29,7	75	97,3	97,3	149,69

Jumlah Program	4	
jumlah indikator kinerja program	14	
Tahun	2018	2019
Yang tercapai target	14	11
Yang tidak tercapai target	0	3
Yang N/A	0	0
% capaian	100	78,57

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INSPEKTORAT KOTA BOGOR 2019

